

**TRILEMA GLOBALISASI;
DINAMIKA DEMOKRASI DAN KEDAULATAN DALAM
FENOMENA BREXIT**

Muhammad Badaruddin
Dosen di Universitas Bakrie

Abstract

As globalization has been fading away with subsequent consequences in 2008 financial crises, the current world is now witnessing further negative impacts on wider aspects social, economic, political and security. Such a catastrophic constellation of present-day with Trump's words that resembles this 'globalismo-phobia' and the move of Britain Exit as a manifestation of threat of such sacred phrase like free trade and global migration—poses a big problem on where we are to go. What could a democracy give its solution to this and how should sovereignty be defined and developed? The paper shall discuss this issue, using Dani Rodrik's framework of globalization trimemma. It is the finding of the writer that while alliance and unions of several nation-states may take place, a given nation-state remains an autonomous variable that may play its dynamic role in world politics.

Keywords: *globalization trap, democracy, sovereignty, Brexit*

1. Brexit, Sebuah Fenomena

Globalisasi yang selama ini dianggap sebagai kekuatan yang tak dapat ditolak dan telah 'berjasa' membuat dunia menjadi 'flat' (Friedman, 2005) seperti sedang mengalami *set back*. Bila indikator dari kemajuan globalisasi di bidang ekonomi adalah nilai investasi dan angka perdagangan antar-negara, maka krisis finansial tahun 2008 di Amerika Serikat adalah *turning pointnya*. Sampai delapan tahun setelah itu, nilai investasi dan perdagangan antar negara belum pernah lagi naik sampai nilai tertinggi yang pernah diraih ketika persis menjelang krisis terjadi. Lebih jauh, imbas dari krisis ekonomi masih kita rasakan hingga sekarang, malah semakin meluas hingga melanda dimensi kehidupan selain ekonomi, yakni dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

Imbas dari terjadinya krisis ekonomi ke dalam dunia sosial dan politik sungguh terasa, terutama di Amerika dan Eropa. Banyak korban krisis ekonomi yang mencari-cari akar permasalahan di dimensi kehidupan lainnya, terutama di bidang sosial dan politik. Salah satu potret nyatanya adalah yang terjadi dalam konteks pemilihan Presiden Amerika. Capres dari Partai Republik, Donald Trump menggenjatkan kampanye presidennya dengan retorika ‘*globalismo-phobia*’, yang dalam bentuk nyatanya adalah ketakutan terhadap perdagangan bebas dan imigrasi. Dalam sebuah pidato pada 28 Juni, Trump mempersalahkan problem ekonomi Amerika sebagai “*the consequence of a leadership class that worships globalism over Americanism*” (Time, 2016).

Fenomena ‘*Trump-rhetoric*’ di AS juga terjadi secara beriringan dengan apa yang terjadi di Inggris pada 23 Juni 2016, yakni lahirnya “Brexit” atau “*Britain Exit*” sebagai hasil dari *referendum* yang memutuskan Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa (UE). Referendum yang dinilai oleh Gold (2016) sebagai ‘*the EU’s biggest test to date*’ ini memiliki partisipasi *voters* sebesar 71.8%, yang juga diikuti oleh lebih dari 30 juta *voters*. Referendum tersebut menghasilkan komposisi dukungan sebanyak 52% menghendaki keluar, dibanding 48% yang menghendaki bertahan. Dari empat negara di Britania Raya, England mendapatkan hasil total untuk keluar, dengan komposisi 53.4% (keluar), dibanding 46.6% (bertahan). Demikian juga di Wales, pendukung keluar EU sebanyak 52.5%, dibandingkan yang bertahan sebanyak 47.5%. Aspirasi sebaliknya terjadi di Scotland dan Northern Ireland, yang keduanya mendukung untuk bertahan di UE. Scotland mendapatkan 62% suara untuk bertahan, dibanding 38% yang menghendaki keluar; sementara Northern Ireland menghasilkan 55.8% bertahan, dan 44.2% memutuskan keluar (Wheeler and Hunt, 2016).

Dalam konteks regionalisme, hasil referendum tersebut dianggap sebagai *the worst setback for the European Union* (Schuman, 2016). Karena selain baru pertama kali terjadi dalam sejarah berdirinya Uni Eropa, keputusan ini juga terjadi justru ketika negara-negara anggota UE sedang dihadapkan pada berbagai masalah yang serius secara sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Uni Eropa yang pernah dianggap sebagai *master piece* sekaligus sebagai eksperimen paling ambisius dalam konteks globalisasi seperti sedang memasuki masa senja. Berbagai komentar bernada frustrasi bermunculan di berbagai media di Eropa dan Di Amerika. Termasuk seperti

diungkapkan oleh manajer keuangan terkenal, Bill Gross yang mengatakan bahwa Brexit adalah tanda-tanda datangnya “*the end of globalization as we’ve known it.*” (Schuman, 2016). Bahkan, penulis di media di ibu kota Amerika, *the Washington Post* menuding bahwa “*Britain just killed globalization as we know it*” (Tankersley, 2016).

Dampak secara ekonomi juga langsung dirasakan oleh Inggris pasca munculnya Brexit sebagai hasil dari referendum. Yakni dengan terjadinya penurunan nilai Pound sterling terhadap dolar Amerika, dan juga nilai saham-saham di FTSE yang berlangsung secara dramatis. Inggris juga langsung menderita kehilangan rating kredit *top AAA* yang semula disandangnya, yang menunjukkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Inggris bila melakukan utang. Walau kejutan yang dramatis tersebut tidak berlangsung lama, karena harga saham di Inggris bisa kembali pulih dalam kisaran satu bulan sejak referendum. Bahkan indeks FTSE 100 menunjukkan bahwa saham-saham yang masuk dalam indeks tersebut diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga ketika sebelum referendum. Namun untuk indeks FTSE 250 yang mencakup lebih banyak emiten yang berbasis di Britania Raya, harga saham masih bertahan pada rata-rata harga yang lebih rendah sebesar 1.5% dari sebelum pemilihan Brexit (Wheeler and Hunt, 2016).

Dari deskripsi di atas muncul pertanyaan yang menarik untuk didalami, apakah terjadinya berbagai fenomena yang seolah mengusung *tag line ‘turn back globalization’* adalah fenomena sesaat karena kondisi keterpurukan ekonomi pasca krisis ekonomi 2008 di Amerika dan 2010 di Eropa? Atau, apakah hal ini bukan fenomena biasa, dalam artian ada masalah yang lebih mendasar di dalam proses globalisasi itu sendiri? Apakah globalisasi memang menyimpan masalah di dalam dirinya sendiri? Tentu masih banyak pertanyaan terkait dengan globalisasi yang sangat menarik untuk didiskusikan. Namun sayangnya, terlalu banyaknya analisis yang cenderung melihat sisi negatif dari terjadinya ‘Brexit’, yang membuat kita sedikit belajar dari fenomena yang sebenarnya terjadi pada tanggal 23 Juni yang lalu di Britania Raya. Paper ini memilih untuk menganalisis fenomena Brexit dengan perspektif yang mungkin dianggap tidak populer, yakni dengan menggunakan teori *Globalization Trilemma* dari Dani Rodrik, yang cenderung melihat bahwa ada masalah di dalam globalisasi yang selama ini terjadi.

2. Brexit dalam Perspektif Teoretis

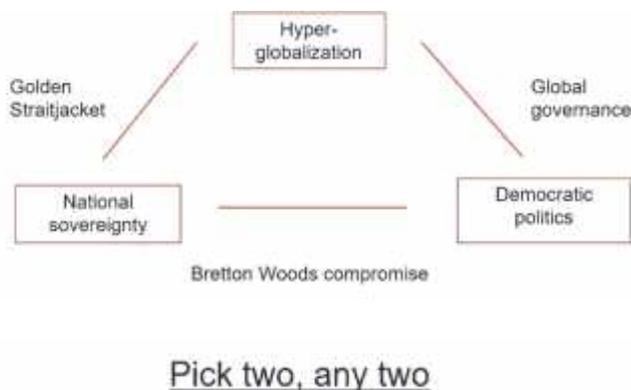
Dalam paper pendek ini penulis akan mendekati fenomena “Brexit, Globalisasi dan Demokrasi,” dengan meminjam beberapa kerangka teori, yakni *structuration theory* dari Anthony Giddens, *four dimensions of globalization* dari Giddens, dan teori *globalization trilemma* dari Dani Rodrik. Ketiga teori yang akan menjadi pisau analisis tersebut berasal dari dua tradisi yang relatif berbeda. Bila Giddens memiliki latar belakang sebagai sosiolog dari *London School of Economics* (LSE) yang bisa dianggap mewakili *British School*, sementara Rodrik adalah seorang guru besar Ekonomi Politik Internasional dari *Kennedy School of Government, Harvard University*, yang mungkin bisa dianggap merepresentasikan *American School*. Pun demikian, paper pendek ini tidak hendak mengkontestasi perdebatan teoretik lintas atlantik antar kedua kampus besar tersebut, selain mencoba mengaplikan keduanya untuk menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dengan fenomena *Brexit*.

Dalam buku “*the Consequences of Modernity*”, Anthony Giddens (1991) memberi batasan tentang globalisasi sebagai “*the intensification of worldwide social relations linking distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many thousands of miles away and vice versa*.” Dalam hemat penulis, frasa kunci yang menjadi *stressing* dari definisi oleh Giddens tersebut adalah “intensifikasi hubungan sosial...sehingga peristiwa sosial dibentuk oleh kejadian di tempat yang jauh, dan demikian pula sebaliknya.”

Adanya hubungan sosial yang semakin intensif yang dilanjutkan dengan adanya saling membentuk (“*shaped*” bukan sekadar “*influenced*”) tersebut memberi tambahan penjelasan tentang teori strukturasi yang menjadi salah satu *masterpiece* Giddens. Teori yang banyak dibahas dalam bukunya “*The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*” (1986) tersebut menunjukkan bahwa kehidupan manusia (sebagai *agent*) dan struktur masyarakat (sebagai *structure*) selalu saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, repetisi dari tindakan agen individu akan mereproduksi struktur. Hal tersebut berarti bahwa *social structure* seperti tradisi, kelembagaan, kode etik dan moral, serta cara-cara ‘baku’ untuk mengerjakan sesuatu akan terus dianut, sampai ketika para *agents* mengabaikannya, menggantinya, dan bahkan mereproduksi sesuatu yang baru sama sekali.

Selanjutnya, Giddens mendefinisikan *dimensions of globalizations* sebagai berikut. Yang *pertama* adalah ‘*the world capitalist economy*’, hal ini menegaskan bahwa epicentrum kekuatan ekonomi dunia adalah *capitalist state*, yang menciptakan kondisi dimana korporasi bisnis menjadi panglima dari struktur produksi dunia (Giddens, 1991). Dimensi yang *kedua* adalah ‘*the nation-state system*’, yang secara substantif menjadi ruang eksistensi dari konsep *sovereignty* atau kedaulatan. Konsep *sovereignty* inilah yang menjadi penegas dari pengambilalihan peran dari “*frontiers*” menjadi “*borders*” dalam mendefinisikan ruang lingkup kekuasaan *nation-state* ketika pertama kali dibangun pasca perjanjian *Westphalia* (Giddens 1991). Sementara dimensi yang *ketiga* adalah ‘*world military order*’, yang ditandai dengan hasil dari kontestasi secara *massive* dari kekuatan destruktif, sehingga nyaris setiap negara memiliki kekuatan militer jauh melebihi kebutuhannya sendiri. Contohnya adalah realitas bahwa banyak negara dunia ketiga yang lemah secara ekonomi namun *powerful* secara militer (Giddens 1991). Dimensi keempat globalisasi adalah ‘*industrial development*’, yang ditandai dengan semakin meluasnya *global interdependence* antar-negara, terutama dalam berbagai bentuk *division of labor* dan *diffusion of technologies* (Giddens, 1991).

Sementara dalam teori yang ketiga, *the globalization trilemma*, Rodrik (2000) menyebutkan bahwa ada tiga karakter yang dimiliki oleh *nation-state* (*agent* dalam istilah Giddens) dengan dinamika global (*structure* dalam istilah Giddens), dan ketiganya saling terhubung dalam konteks globalisasi. Ketiga karakter tersebut adalah *hyper-globalization*, *sovereignty*, dan *democratic politics*, yang alih-alih ketiganya bisa saling mendukung, namun dalam realitasnya mustahil untuk disandingkan. Dalam artikelnya yang terbaru, Rodrik (2016b) bahkan menyebutkan relasi antara tiga hal sebagai ‘*impossibility theorem for the global economy*’. Rodrik menjelaskan bahwa demokrasi, kedaulatan nasional, dan integrasi ekonomi global adalah *mutually incompatible*, yang berarti bahwa kita bisa mengombinasikan dua di antara tiga hal tersebut, namun tidak bisa mengombinasikan ketiganya secara sekaligus dan sepenuhnya. Hubungan antara ketiga hal tersebut dapat dilihat dalam model pemikiran berikut:



3. Brexit dalam Analisis

Teori trilemma globalisasi menunjukkan bahwa di antara *hyper-globalization*, politik yang demokratis, dan kedaulatan nasional memang terdapat saling keterhubungan. Namun aplikasi hubungan tersebut hanya akan efektif dan tidak menimbulkan konflik bila dilakukan di antara dua hal di antara ketiga hal seperti tergambar di atas. Dalam konteks ini, penulis hendak membahas relasi antara aktor politik domestik di Inggris dengan sistem parlementariannya dengan lembaga-lembaga politik yang ada di level regional, yakni di Uni Eropa. Penulis menempatkan Uni Eropa sebagai lembaga regional yang merepresentasi kehadiran *hyper-globalization* di Benua Eropa. Sementara di sisi lain penulis menempatkan gerakan sebagian pemimpin di Inggris yang mengusung ‘Brexit’ adalah sebagai manifestasi dari *national sovereignty* yang dianggap terbatas oleh ‘kekuasaan’ yang dimiliki oleh ‘*supra-national organization*’.

Dalam kondisi tertentu, relasi antara *hyper-globalization* dengan *national interest* bisa berhubungan dan diaplikasikan dengan baik, yakni dengan dijalankannya berbagai komitmen kelembagaan antara negara-negara yang berada di dalam Uni Eropa untuk mengatur masing-masing negara anggota. Komitmen kelembagaan tersebut biasanya dituangkan ke dalam aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing negara. Dalam kerangka yang dibuat oleh Rodrik di atas, aturan-aturan tersebut disebut sebagai ‘*golden straitjacket*’ atau ‘baju pengekang emas’. Penamaan tersebut bermakna bahwa walaupun penggunaan baju tersebut akan mengekang pemakainya, namun praktek tersebut diyakini akan menimbulkan kebaikan untuk seluruh pihak yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut.

Namun dalam praktiknya, *golden straitjacket* yang mengatur setiap anggota organisasi agar bertindak untuk kepentingan seluruh negara anggota, malah dianggap mengekang negara-negara tertentu. Rasa pengekangan ini akan timbul ketika muncul faktor ketiga, yakni *democratic politics*. Karena proses politik yang dilakukan oleh sebuah negara dalam konteks regionalisme, sangat mungkin untuk tidak dilakukan secara demokratis. Terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat sebagai anggota. Dalam konteks ini, proses pengambilan keputusan di level organisasi internasional, sangat mungkin berbeda dengan kepentingan yang berkembang dalam proses politik secara nasional masing-masing negara. Sehingga memunculkan konflik kepentingan antara proses demokratis yang terjadi di dalam negeri dengan ‘mekanisme demokrasi’ yang terjadi di tingkat antar-negara.

Inilah yang terjadi dengan proses politik di Inggris dan di Uni Eropa. Ketika Eropa sedang dilanda krisis ekonomi, dan kemudian diserbu oleh datangnya imigran dari luar Eropa, pihak pemegang otoritas di Uni Eropa membuat kebijakan yang dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai organisasi, tentu UE berusaha mengorganisir langkah kolektif secara bersama di antara seluruh negara anggota Uni Eropa. Namun penyikapan negara anggotanya, yang dalam kasus ini adalah Inggris ternyata berbeda. Pertimbangan *cost-benefit* pasti ikut dilakukan untuk mengukur apakah *national interest* Inggris masih akan terjamin dalam konteks kerja sama internasional. Berbagai aspirasi yang berkembang dalam publik di Inggris kemudian masuk kedalam proses *democratic politics*, yang bermuara pada dilakukannya referendum pada tanggal 23 Juni yang lalu. Berdasarkan proses politik itu pula, kemudian diambil kesimpulan bahwa mayoritas rakyat Inggris merasa keberatan dengan keputusan yang diambil pada tingkat UE, yang dimanifestasikan secara tegas dengan memutuskan: “Brexit!”.

Bila kita perhatikan lebih dalam aspirasi yang berkembang di kalangan pihak yang mengambil sikap agar Inggris keluar dari UE, tampak sekali bahwa retorika yang ditampilkan oleh para pengusung aspirasi untuk meninggalkan Uni Eropa adalah terkait dengan isu-isu politik. Salah satu pengusung Brexit yang banyak menjadi rujukan publik Inggris adalah editor *the Daily Telegraph*, Ambrose Evans-Pritchard, yang sangat aktif terlibat menggerakkan ide-ide agar Inggris keluar dari UE. Dalam publikasinya, Pritchard menuliskan semacam ‘*fatwa*’ yang dianggap sebagai rujukan politik bagi para pendukung Brexit.

Pritchard dianggap mampu mengklarifikasi dengan sangat baik berbagai kecurigaan terhadap berbagai kepicikan politik yang diusung oleh para ‘Brexiters’. Dia menjelaskan bahwa dukungannya agar Inggris memisahkan diri dari Uni Eropa bukanlah terkait dengan sentimen ‘*jingoistic*’ atau ‘*nativist tone*’ yang selama ini memang tak bisa dipisahkan dari retorika yang diusung oleh para misionaris Brexit. Bahkan menurutnya, proses referendum untuk keluar dari UE adalah untuk menjawab pertanyaan serius mengenai bagaimana cara Britania Raya akan diperintah:

“...whether to restore the full self-government of this nation, or to continue living under a higher supranational regime, ruled by a European Council that we do not elect in any meaningful sense, and that the British people can never remove, even when it persists in error.”

Jadi, statemen di atas menunjukkan bahwa referendum di bulan Juni yang lalu adalah untuk menjawab isu-isu mendasar dari sebuah praktek berpolitik, yakni “...apakah mengembalikan pemerintahan secara penuh kepada bangsa British, atau melanjutkan kehidupan politik di bawah rezim supra-nasional yang lebih tinggi, yang diperintah oleh Dewan Eropa.” Dan kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang mendasar, terutama terkait dengan landasan otoritas yang dimiliki dan mekanisme pertanggung-jawaban yang harus dilakukan oleh Dewan Eropa. Pritchard mengidentifikasi Dewan Eropa sebagai pihak “...yang tidak pernah kita pilih dengan cara yang demokratis (*meaningful sense*), yang bahkan rakyat Britania tidak akan bisa menggantinya, pun ketika Dewan tersebut berulang-ulang terjebak dalam kesalahan.”

Pritchard memandang bahwa referendum adalah untuk memperjelas posisi dan sikap rakyat Britania Raya terhadap dinamika politik yang terjadi secara domestik di negerinya sendiri atau secara regional di ruang lingkup Eropa. Dalam statemennya dapat dipahami bahwa substansi dari ide Brexit adalah terkait dengan *authority* (kewenangan), *legitimacy* (sumber kewenangan), *accountability* (pertanggungjawaban), dan bahkan *sovereignty* (kedaulatan). Di sini penulis melihat bahwa referendum tersebut adalah pentas untuk mengontestasi diskursus yang sangat serius mengenai prinsip-prinsip mendasar yang menjadi hak dari sebuah bangsa yang memberi landasan bagi lahirnya konsep *nation-state* dalam perjanjian Westphalia.

Kemudian Pritchard melanjutkan argumentasinya bahwa penentuan pendapat tersebut adalah kepentingan Bangsa British untuk menentukan:

“...whether to be guided by a Commission with quasi-executive powers that operates more like the priesthood of the 13th Century papacy than a modern civil service; and whether to submit to a European Court (ECJ) that claims sweeping supremacy, with no right of appeal. It is whether you think the nation states of Europe are the only authentic fora of democracy, be it in this country, or Sweden, or the Netherlands, or France...”

Dalam statemen di atas, bahkan Pritchard melancarkan kritik keras terhadap Komisi Eropa yang dinilai memimpin Uni Eropa dengan kekuasaan ‘*quasi-executive*’, namun menjalankannya dengan cara yang lebih mirip dengan beroperasinya jemaat kerahiban yang dipimpin oleh lembaga kepausan pada Abad ke-13. Substansi dari kritik ini adalah pada melebarnya kesenjangan aspirasi dan akuntabilitas yang terjadi di antara pihak-pihak yang berada pada pusat pengambilan kebijakan di Uni Eropa dengan para wakil rakyat (sistem parlemen di Inggris) yang mengambil kebijakan di tingkat negara.

Dari elaborasi gagasan yang dimiliki oleh para pengusung Brexit seperti di atas, kita menemukan konteks yang mendukung terjadinya teori *the globalization trilemma*. Trilemma tersebut menjelaskan bahwa praktek demokrasi yang diterapkan pada level domestic hanya akan kompatibel dengan integrasi ekonomi yang mendalam hanya jika penerapan demokrasi juga diaplikasikan secara trans-nasional, sebagaimana integrasi ekonomi juga diterapkan secara trans-nasional. Namun gagasan tersebut juga tidak benar-benar realistis, usaha penerapannya jelas akan menemui sangat banyak hal dilematis. Sebagaimana para pendukung perpisahan Inggris dari Uni Eropa menyanggah gagasan pembentukan system demokrasi secara trans-nasional tersebut. Sanggahan tersebut bukan karena mereka tidak suka sama sekali dengan segala yang bersifat trans-nasional, namun mereka mempercayai bahwa gagasan *trans-national democratic system* bukanlah jawaban atas kemauan mereka. Para pengusung Brexit menyadari bahwa ide untuk membentuk *democratic and accountable European super-state* adalah ide yang tidak *feasible*.

Pun demikian, juga penting untuk dicatat bahwa ketegangan-ketegangan yang potensial timbul di antara demokrasi dan globalisasi

bukanlah konsekuensi decara langsung dari globalisasi yang telah membatasi kedaulatan nasional. Walau globalisasi memang memiliki kecenderungan untuk ‘membatasi’ kedaulatan yang dimiliki oleh negara-bangsa, namun hal tersebut lebih disebabkan karena ‘atmosfer’ yang terjadi dalam organisasi regional itu sendiri. Yakni adanya kondisi-kondisi yang diciptakan untuk mengimplementasikan aturan-aturan eksternal yang tidak bisa memuaskan kondisi yang dialami oleh para perwakilan demokrasi yang diutus oleh negara-negara.

Selanjutnya, semakin menarik untuk memahami aspirasi yang berkembang di kalangan yang mendukung Brexit, sebagaimana penilaian Pritschard terhadap Uni Eropa yang dianggap tidak mampu menghadirkan proses politik yang legitimate di level Eropa:

“The [European] Project bleeds the lifeblood of the national institutions, but fails to replace them with anything lovable or legitimate at a European level. It draws away charisma, and destroys it. This is how democracies die.”

Kalimat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kritik yang disampaikan para pengusung Brexit adalah adanya keprihatinan terhadap proyek Uni Eropa yang dianggap telah melemahkan *elan vital* yang dimiliki oleh lembaga-lembaga di tingkat nasional. Namun sayangnya, Uni Eropa telah gagal dalam menyediakan gantinya dengan sesuatu yang *legitimate* atau sesuatu yang mampu memikat hati publik pada tingkat Eropa. Selanjutnya secara lebih dalam para *Brexiters* melihat bahwa Uni Eropa telah mencerabut akar dari proses-proses politik dengan cara teknokratis dibanding dengan melakukan cara-cara yang demokratis.

Sebelum lahirnya gagasan tentang Brexit, Rodrik (2016b) mengakui bahwa dia sebelumnya melihat Uni Eropa sebagai satu-satunya proyek ambisius dari globalisasi yang mengalami keberhasilan. Kesuksesan utamanya adalah pada kemampuan Uni Eropa untuk mengombinasikan *hyperglobalization* –atau lebih spesifik dia menunjuk sebagai praktek “*the single market*”— dengan praktek *democratic politics* melalui pembentukan ‘*European demos and polity*’ sebagai *global governance* sebagaimana dalam kerangka teori trilemma globalisasi yang dijelaskan sebelumnya. Dalam pengakuannya, Rodrik (2016b) menjelaskan argumennya tentang kekagumannya terhadap keberhasilan Uni Eropa sebagai *mega-project*

globalisasi dalam bukunya “*The Globalization Paradox*” yang terbit pada tahun 2011.

Namun, kemenangan gagasan yang mendukung Brexit dalam penentuan pendapat di Inggris pada Juni lalu membuat Rodrik (2016b) harus mengoreksi pendapatnya yang terdahulu. Dia melihat tentang bagaimana cara Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa bereaksi terhadap krisis di Yunani dan negara pengutang lainnya adalah sangat kurang selayaknya. Rodrik menyorot lebih khusus berbagai sepak terjang Angela Merkel yang sedang memegang kendali untuk memimpin penyelamatan Eropa, sebagai perilaku yang “*buried any chance of a democratic Europe.*” Rodrik (2016b) mencatat bahwa terjadinya krisis di Yunani adalah momentum yang sangat baik bagi Merkel untuk memperkuat interdependensi dan kebersamaan negara-negara Eropa. Menggunakannya sebagai kesempatan untuk membuat sebuah lompatan menuju kesatuan politik yang lebih mantab di Eropa. Namun sayangnya, ketika itu Merkel malah menjadikan krisis Yunani sebagai sebuah ‘*morality play*’, yang terkesan mengadu domba antara ‘negara utara’ yang penuh tanggung jawab, dibanding ‘negara selatan’ yang malas dan boros (Connolly, 2015).

4. Simpulan

Menganalisis fenomena Brexit sebagai salah satu bentuk respons dari sebuah *nation-state* dan *democratic politics* terhadap sebuah *hyper-globalization* adalah kerangka analisis yang sangat bermanfaat. Kerangka analisis yang merujuk kepada teori *globalization trilemma* ini, mampu menghadirkan perspektif yang lebih cermat terhadap peran *national interest* dan *sovereignty* dalam mendeterminasi arah kebijakan sebuah *nation-state*. Meskipun berbagai negara-bangsa yang terhimpun dalam sebuah organisasi internasional telah terpilin dengan adanya *inter-dependence* yang semakin menguat, namun sifat otonom yang dimiliki oleh negara-bangsa tetap menjadi variabel bebas yang senantiasa dinamis. Di sini, seperti direpresentasikan oleh fenomena Brexit, *national interest* bergerak di ruang dinamis dalam politik domestiknya. yang ditentukan oleh *internal dynamics* yang digerakkan melalui *democratic politics*. Sehingga, penulis memungkasi rangkaian analisis ini dengan sebuah simpulan bahwa fenomena Brexit adalah bersifat alamiah sebagaimana konsep *nation-state* telah dilahirkan oleh *system Westphalia*.

Daftar Pustaka

Buku

Friedman, T. L. (2005). *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Cambridge: Polity Press.

Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. New York: W.W. Norton & Co.

Artikel Jurnal

Rodrik, D. (2000). "How Far Will International Economic Integration Go?," *Journal of Economic Perspectives*, Volume 14, Number 1, winter 2000, pp. 177–186.

Artikel Media Online

Chandran, N. (2016, Jun 28). "How Brexit impacts globalization". CNBC Online. Melalui <http://www.cnbc.com/2016/06/28/how-brexit-impacts-globalization.html> [10/08/16]

Connolly, K. (2015, July 15). "Greek bailout: Angela Merkel accused of blackmailing Athens". The Guardian. Melalui <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/greek-bailout-angela-merkel-blackmail-athens-opposition> [10/08/16]

Crook, C. (2016, Aug 21). "The Brexit Question That Nobody Asked". Bloomberg View. Melalui <https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-21/the-brexit-question-that-nobody-asked> [21/08/16]

Davies, W. (2016, July 13) "Liberalism after Brexit". Political Economy Research Center. Melalui http://www.perc.org.uk/project_posts/liberalism-after-brexit/ [12/08/16]

Deutsche Welle (2016). Brexit , the end of globalization?. DW Online. Melalui <http://www.dw.com/en/brexit-the-end-of-globalization/a-19369680> [09/08/16]

- Elliott, L. (2016, 26 June). "Brexit is a rejection of globalization". The Guardian. Melalui <https://www.theguardian.com/business/2016/jun/26/brexit-is-the-rejection-of-globalisation> [08/08/16]
- Galt, J. (2016, June 12). "Ambrose Evans-Pritchard: Why I am voting to leave the EU". Blog John Galt. Melalui <http://johngaltfla.com/wordpress/2016/06/12/ambrose-evans-pritchard-why-i-am-voting-to-leave-the-eu/> [10/08/16]
- Gold, H., (2016, June 24). "Globalization loses in Brexit vote, but it's not the end of the world". Market Watch. Melalui <http://www.marketwatch.com/story/globalization-loses-in-brexit-vote-but-its-not-the-end-of-the-world-2016-06-24> [11/08/16]
- Kharas, H. (2016, June 24). "What does Brexit mean for poor people?". Brookings Institute. Melalui <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/06/24/what-does-brexit-mean-for-poor-people/> [12/08/16]
- Mervyn King (2016, Aug 18). "Which Europe Now?". New York Review of Books. Melalui <http://www.nybooks.com/articles/2016/08/18/which-europe-now/?pagination=false&printpage=true> [20/08/16]
- Lee, D. (2016, June 24). "Will the 'Brexit' mark the end of the age of globalization?" LA Times Online. Melalui <http://www.latimes.com/business/la-fi-brexit-globalization-future-20160624-snap-story.html> [11/08/16]
- Newman, M. (2016, August 19). "Post-Brexit, we aren't the world as anti-globalisation grows". The Australian. Melalui <http://www.theaustralian.com.au/opinion/postbrexit-we-arent-the-world-as-antiglobalisation-grows/news-story/01d54c4ca27743c4c9f532709ba72541> [11/08/16]
- Rodrik, D. (2007, June 27). "The inescapable trilemma of the world economy". Blog Dani Rodrik. Melalui http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/06/the-inescapable.html [11/08/16]
- Rodrik, D. (2016a, March 11). "More on the political trilemma of the global economy". Blog Dani Rodrik. Melalui

http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2016/03/more-on-the-political-trilemma-of-the-global-economy.html [11/08/16]

Rodrik, D. (2016b, August 11). “21 The False Economic Promise of Global Governance”. Project Syndicate. Melalui <https://www.project-syndicate.org/commentary/global-governance-false-economic-promise-by-dani-rodrik-2016-08> [11/08/2017]

Schuman, M., (2016, July 14). “Brexit Won’t Stop Globalization: Beyond the West, trade ties are growing and deepening”. Bloomberg. Melalui <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-14/brexit-won-t-stop-globalization>, [09/08/16]

Schwartz N. D., and Patricia Cohen (2016, June 25). “Brexit in America: a Warning Shot Against Globalization”. New York Times. Melalui http://www.nytimes.com/2016/06/26/business/economy/for-america-brexit-may-be-a-warning-of-globalizations-limits.html?_r=0 [10/08/16]

Stiglitz, J. E. (2016, Aug 5). “Globalization and its New Discontents”. Project Syndicate. Melalui <https://www.project-syndicate.org/commentary/globalization-new-discontents-by-joseph-e--stiglitz-2016-08> [11/08/16]

Tankersley, J., (2016, June 25). “Britain just killed globalization as we know it”. Washington Post. Melalui <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/06/25/great-britain-just-killed-globalization-as-we-know-it/> [10/08/26]

Time (2016, June 28). “Read Donald Trump’s Speech on Trade”. Time Online. Melalui <http://time.com/4386335/donald-trump-trade-speech-transcript/> [09/08/16]

Warner, J. (2016, 19 July). “If this is the end of globalisation, what hope for UK trade post Brexit?”. Daily Telegraph Online. Melalui <http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/19/if-this-is-the-end-of-globalisation-what-hope-for-uk-trade-post/> [10/08/16]

Wheeler B., and Alex Hunt (2016, 10 August). “Brexit; All you need to know about the UK leaving the EU”. BBC News. Melalui <http://www.theweek.co.uk/brexit/73066/eu-referendum-the-date-the-facts-and-the-latest-brexit-odds> [12/08/16]